

POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN FILIPINA TAHUN 2016 DAN 2022

Ritusman Daeli¹, Indra Fauzan²

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober, 2025

Revised Oktober, 2025

Accepted Oktober, 2025

Available online Oktober, 2025

EMAIL:

ritusmandaeli@student.usu.ac.id¹,

indra.fauzan@usu.ac.id²

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.*

ABSTRAK

Pemilu merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilihan umum di Filipina sering terjadi praktik politik dinasti, di mana kekuasaan diwariskan dalam lingkaran keluarga atau kerabat dekat. Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Filipina tahun 2016 dan 2022, ada beberapa kandidat yang terindikasi politik dinasti. Fenomena politik dinasti di Filipina merupakan hal yang sering terjadi di negara tersebut. Politik dinasti Filipina ada dua tingkatan, yaitu politik dinasti nasional dan politik dinasti lokal. Politik dinasti nasional merupakan sekelompok keluarga yang sudah menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan menempatkan kembali keluarga mereka dalam jabatan tersebut, sementara politik dinasti lokal yaitu sekelompok keluarga yang menguasai wilayah tertentu dan menduduki jabatan seperti Wali Kota, Wakil Wali Kota, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan politik dinasti di Filipina, dan untuk mengetahui politik dinasti dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Filipina tahun 2016 dan 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Adapun hasil penelitian ini adalah praktik politik dinasti di Filipina sudah ada pada masa penjajahan di mana pada masa penjajahan hak pilih dan jabatan pemerintahan di batasi hanya untuk orang-orang tertentu. Dan pada pemilihan Presiden 2016 dan 2022 terdapat beberapa calon terindikasi politik dinasti baik tingkat nasional maupun lokal, dan adanya politik dinasti baru di tingkat nasional. Adapun saran dalam penelitian ini adalah agar Filipina lebih memperjelas mengenai undang-undang politik dinasti supaya dapat di Implementasikan.

Kata Kunci: Pemilu, Demokrasi, Politik Dinasti

ABSTRACT

Elections are one of the instruments used to implement the principles of democracy. General elections in the Philippines often involve the practice of dynasty politics, where power is inherited within the family circle or close relatives. In the 2016 and 2022 Philippine Presidential and Vice Presidential elections, there were several candidates who were suspected of dynasty politics. The phenomenon of dynasty politics in the Philippines is something that often occurs in the country. There are two levels of Philippine dynasty politics, namely national dynasty politics and local dynasty politics. National dynasty politics is a group of families who have held the positions of President and Vice President and re-place their families in those positions, while local dynasty politics is a group of families who control a certain area and hold positions such as Mayor, Deputy Mayor, Governor, Deputy Governor, and Member of the House of Representatives. The purpose of this study is to determine the development of dynasty politics in the Philippines, and to determine dynasty politics in the 2016 and 2022 Philippine Presidential and Vice Presidential elections. The method used in this study is Qualitative Descriptive. The results of this

study are that the practice of dynasty politics in the Philippines has existed since the colonial era, where during the colonial era, voting rights and government positions were limited to certain people. And in the 2016 and 2022 presidential elections, there were several candidates indicated as having dynasty politics both at the national and local levels, and there was a new dynasty politics at the national level. The suggestion in this study is for the Philippines to clarify the dynasty politics law so that it can be implemented.

Keywords: Election, Democracy, Dynasty Politics.

PENDAHULUAN

Begitu pula dengan negara yang menganut bentuk dan sistem pemerintahan yang sama belum tentu menganut sistem pemilu yang sama. Ada berbagai sistem pemilu yang ada di dunia, sistem-sistem ini dapat di kategorikan secara luas sebagai berikut: pertama, sistem pluralitas, sistem ini merupakan membagi negara menjadi distrik pemilihan, masing-masing diwakili oleh satu orang, dengan kandidat yang menerima suara terbanyak memenangkan kursi. Kedua, sistem proporsional, sistem ini merupakan mengalokasikan kursi secara proporsional dengan suara yang diterima oleh partai politik di distrik pemilihan tertentu. Ketiga, sistem campuran, sistem ini merupakan menggabungkan unsur-unsur sistem pluralitas/mayoritas dan proporsional. Pemilihan umum (pemilu) adalah sistem untuk memilih wakil rakyat dan merupakan wujud demokrasi untuk menyalurkan hak politik setiap warga negara.

Pemilihan umum di Filipina telah mengalami perubahan sejak negara ini merdeka. Sistem pemilihan umum di Filipina menggunakan sistem pluralitas, yang di kenal sebagai “*first past the post*”, di mana kandidat hanya perlu mendapatkan lebih banyak suara dari pada kandidat memenangkan pemilihan tanpa memerlukan mayoritas suara (lebih dari 50%). Sistem ini berlaku untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Filipina merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki sistem pemerintahan demokratis. Demokrasi di Filipina telah berkembang sejak negara ini memperoleh kemerdekaan dari Amerika Serikat pada tahun 1946.

Sejak memperoleh kemerdekaan dari Amerika pada tahun 1946, Filipina mewarisi banyak aspek pemerintahan dan politik Amerika, salah satunya penggunaan sistem pluralitas dalam pemilihan umum. Penerapan sistem ini sejalan dengan upaya awal Filipina dalam membangun pemerintahan yang demokratis berbasis pada pemilihan langsung. Pada Prinsipnya sistem *first past the post* merupakan suatu metode di mana kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu daerah pemilihan langsung dinyatakan sebagai pemenang, tanpa memerlukan mayoritas absolut. Sistem Pluralitas mulai diterapkan secara luas setelah transisi menuju demokrasi pasca-rezim Marcos pada tahun 1986. Namun, demokrasi di Filipina masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, Filipina telah mengalami perubahan politik yang signifikan, termasuk terpilihnya Presiden Rodrigo Duterte pada tahun 2016 dan Bongbong Marcos pada tahun 2022. Kepemimpinan Duterte dan Marcos telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan tentang demokrasi di Filipina. Sistem pluralitas, meskipun memberikan kesempatan bagi banyak kandidat untuk bersaing, sering kali menguntungkan mereka yang memiliki dukungan politik yang kuat dan sumber daya yang memadai. Hal ini memperkuat posisi dinasti politik, di mana kandidat dari keluarga yang sudah mapan dapat dengan mudah menarik pemilih melalui jaringan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Politik dinasti merupakan fenomena yang terjadi di banyak negara, termasuk Filipina di mana kekuasaan politik sering di wariskan dalam lingkaran keluarga. Pada pemilihan Presiden Filipina tahun 2016 terdapat beberapa calon antara lain, Rodrigo Duterte, Mar Roxas, Grace Poe, Jejomar Binay, dan Miriam Defensor Santiago. Pemilihan ini menjadi titik penting dalam memahami politik dinasti, di mana kandidat utama, Rodrigo Duterte yang mencerminkan pengaruh keluarga dalam politik. Rodrigo Duterte yang terpilih menjadi Presiden berasal dari keluarga yang telah lama terlibat dalam politik lokal di Kota Davao. Rodrigo Duterte berkuasa di Kota Davao selama 22 tahun sebagai Wali Kota Davao yang merupakan kota terbesar ketiga di Filipina. Fenomena politik dinasti di Filipina tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup jaringan keluar yang saling mendukung dalam meraih kekuasaan. Keluarga Duterte masih berkuasa di Kota Davao hingga saat ini.

1. Rodrigo Duterte: Feb 5, 1988 TO June 30, 1998
July 1, 2001 - June 30, 2010
July 1, 2013 - June 30, 2016
2. Sara Duterte: July 1, 2010 - June 30, 2013
July 1, 2016 - June 30, 2022
3. Bastian Duterte: July 1, 2022 up to present (davaocity.gov.ph).

Selain itu, anak sulungnya Rodrigo Duterte, Paolo Duterte adalah seorang politikus Filipina yang menjadi DPR mewakili dapil Kota Davao. Sebelum menjadi DPR ia sebelumnya merupakan mantan Wakil Wali Kota Davao pada tahun 2013-2017. Rodrigo Duterte memenangkan pemilihan Presiden pada tahun 2016. Ia terpilih sebagai Presiden dengan perolehan suara 39.01%. Setelah masa jabatan presiden habis pada tahun 2022, ia mengusung anak nya Sara Duterte sebagai calon Wakil Presiden tahun 2022. Tidak hanya itu Rodrigo Duterte kembali mencalonkan dirinya pada pemilihan Wali Kota Davao tahun 2025.

Sejumlah dinasti politik menguasai Filipina secara bergantian. Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2016 beberapa kandidat merupakan keturunan tokoh berpengaruh di Filipina, seperti Mar Roxas Cucu Presiden Manuel Roxas dan Bongbong Marcos anaknya Presiden Ferdinand Marcos, sedangkan pada tahun 2022, kandidat seperti Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr, dan Sara Duterte merupakan keturunan dari tokoh politik yang berpengaruh di Filipina. Di dalam Konstitusi Filipina pada Bab II, Pasal 26 dijelaskan bahwa *“The State shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law.”* Pasal tersebut menegaskan perihal larangan terhadap politik dinasti dan bahwa negara harus menjamin akses yang sama bagi setiap warga negara terhadap kesempatan untuk pelayanan publik (Pasan E, 2013). Ada beberapa kandidat calon Presiden Filipina pada pemilu 2022. Pertama, Maria Leonor yang merupakan wakil Presiden Duterte pada tahun 2016-2022. Kedua, Francisco Moreno yang merupakan mantan Wali Kota Manila. Ketiga, Emmanuel yang akrab di panggil Manny Pasquiao, yang merupakan atlet tinju juara dunia. Keempat, yang terakhir yaitu Ferdinand Romualdez Marcos Jr (Bongbong Marcos) yang merupakan seorang putra mantan Presiden Filipina. Di antara beberapa calon presiden tersebut yang paling mendapat perhatian adalah Bongbong Marcos yang berkoalisi dengan Sara Duterte putri mantan Presiden Filipina. Keberadaan mereka dalam kontestasi politik ini menunjukkan bahwa politik dinasti berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan dan pemerintah Filipina. Publik dikejutkan

dengan persekutuan dinasti Marcos dan Duterte yang membawa Presiden Marcos Jr dan Wapres Duterte-Carpio berkuasa pada 2022. Sebagai seorang politisi karir politik Bongbong Marcos di mulai pada tahun 1980 sebagai Wakil Gubernur Provinsi Ilocos Norte. Bongbong Marcos juga tercatat pernah menjadi gubernur, anggota DPR, hingga senator (BBC.COM). Kendati demikian, kongsi dua dinasti itu pun pecah, lebih cepat daripada perkiraan para analis. Puncaknya adalah ancaman pembunuhan terhadap Marcos, dan kini pemakzulan terhadap Duterte-Carpio. Keduanya merupakan keturunan dinasti politik Filipina, Sara Duterte adalah putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, sementara Bongbong Marcos Jr adalah putra mendiang pemimpin kuat Ferdinand Marcos Sr.

Pada 1965 Presiden Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos naik. Ia menjabat sebagai presiden selama 21 tahun sampai 1986. Filipina pada saat itu jatuh pada rezim otoriter di bawah kepemimpinan Ferdinand Marcos. Kolusi, korupsi dan nepotisme merajalela selama masa kepemimpinan Ferdinand Marcos. Ia membuat kesenjangan ekonomi makin besar karena sistem ekonomi liberal yang dianut pada saat itu. Oleh karenanya pada tahun 1986 terjadi protes besar-besaran yang dilakukan rakyat Filipina yang di kemudian hari dikenal dengan “people power” dengan tuntutan menurunkan paksa Ferdinand Marcos. Rodrigo Duterte menjabat sebagai Filipina dari tahun 2016-2022. Sebelum menjabat sebagai Presiden, Rodrigo Duterte pernah menjabat sebagai Wali Kota Davao. Keluarga Duterte memiliki sejarah panjang dalam Politik Kota Davao, dengan Rodrigo Duterte yang menjabat sebagai wali kota selama lebih dari 22 tahun dalam beberapa periode, dan kemudian kekuasaan keluarga Duterte di kota Davao terus berlanjut dimana anaknya, Sara Duterte dan Bastian Duterte pernah menjadi Wali Kota Davao hingga pada saat ini Bastian Duterte masih menjadi Wali Kota Davao. Setelah Rodrigo Duterte habis masa jabatan sebagai Presiden, ia kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Davao pada Pemilihan Wali Kota 2025. Selain itu Kekuasaan Duterte terus berlanjut, pada pemilihan Presiden dan wakil Presiden 2022, Sara Duterte mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden, dan menjadi Wakil Presiden terpilih Filipina Pada tahun 2022. Keluarga Duterte masih berkuasa di Filipina, Paolo Duterte masih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Di Filipina, kekerasan di pemilihan umum terjadi baik tingkat nasional maupun tingkat lokal. Di tingkat nasional, kekerasan itu muncul dari persaingan antar kandidat dan pendukung mereka. Salah satu persaingan sengit yang diwarnai dengan gerakan *people power* adalah persaingan politik antara Marcos dan Aquino pada tahun 1986, meski persaingan serupa tidak pernah lagi muncul di ranah nasional. Kekerasan terkait pemilu tampaknya menjadi lebih terarah sejak pemilu 1998. Dalam pemilu 2010, tindakan kekerasan umumnya berupa penyergapan yang direncanakan, pembunuhan, dan penembakan berencana terhadap kandidat yang menjadi sasaran dan operator kampanye utama (United Nations Development Programme, 2011). Kekerasan dalam pemilihan umum lokal tetap berlangsung dan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika pemilihan umum lokal di Filipina. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian politik dinasti dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Filipina tahun 2016 dan 2022.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena berusaha memahami sesuatu secara mendalam. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian ilmiah yang secara umum untuk mencari jawaban atas sesuatu pertanyaan, secara sistematis menggunakan serangkaian prosedur yang telah di tentukan dan menghasilkan temuan yang tidak dihasilkan sebelumnya dan

menghasilkan temuan di luar batas-batas langsung penelitian. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yang menggambarkan fenomena atau peristiwa secara objektif melalui deskriptif berdasarkan sumber kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data atau informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Perkembangan Politik Dinasti Filipina

Dinasti politik bukanlah fenomena baru di Filipina, klan yang kuat telah lama memainkan peran dalam politiknya selama berabad-abad. Dinasti politik tidak hanya berpindah antar individu, tetapi juga di wariskan dalam lingkup keluarga. Dinasti politik di Filipina bermula saat masa penjajahan dan terus berlanjut hingga saat ini. Selama pendudukan Amerika di Filipina pada awal abad ke-20, hak pilih dan jabatan pemerintahan di batasi hanya untuk warga Amerika dan anggota Principalla. Principalla merupakan status yang diberikan kerajaan sebagai anggota bangsawan pribumi. Principalla bertugas mengumpulkan pajak dan menegakkan hukum. Awal mula dinasti politik di Filipina, dikarenakan status Principalla, dan juga jabatan pemerintahan yang di pegang bersifat turun temurun. Principalla dan jabatan pemerintahan yang bersifat turun-temurun ada pada masa penjajahan bangsa Spanyol. Sejak 2001, warga Filipina telah memilih empat presiden yang semuanya merupakan keturunan dinasti politik. Keluarga-keluarga ini membentuk panggung politik Filipina pada abad ke-21. Tahun 2016-2022, dinasti politik kembali mengambil alih jabatan pemerintahan Filipina, sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Salah satu jabatan pemerintahan yang sering dianggap sebagai awal mula dinasti politik adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Jabatan Wakil Wali Kota dan Wali Kota dianggap sebagai batu loncatan ke jabatan yang lebih tinggi seperti Wali kota, Gubernur dan bahkan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Wali Kota akan dianggap dinasti horizontal jika mereka terkait dengan salah satu jabatan lokal yang diuraikan di atas Wakil Wali Kota, Wali Kota, Anggota Kongres, Wakil Gubernur, atau Gubernur. Sekilas, pemilihan wali kota dan wakil wali kota tampak lebih kompetitif, dengan jumlah kandidat yang lebih sedikit dibandingkan dengan pemilihan gubernur dan kongres.

Dinasti Politik di Filipina berada di sektor lokal dan nasional. Pada masa penjajahan dinasti politik diawali dengan gelar bangsawan, namun pada masa sekarang, dalam memulai karier politiknya, Jabatan Wali Kota awal dari dinasti politik. Menurut data Philippine Center For Investigative Journalism's (PCIJ), atau Pusat Jurnalisme Investigasi Filipina pada Januari 2025, Setidaknya 113 dari 149 wali kota berasal dari dinasti politik, sementara hanya 33 yang bukan berasal dari dinasti politik. Untuk tiga wali kota lainnya, PCIJ menemukan pejabat terpilih yang memiliki nama belakang yang sama, tetapi tidak dapat membuktikan hubungan mereka. Sebanyak 80, atau sekitar 53% dari semua wali kota, adalah dinasti yang ingin dipilih kembali. Sementara itu, 27 wali kota yang sedang menjabat mempertimbangkan kerabat untuk menggantikan mereka karena sebagian besar dari mereka mencalonkan diri untuk jabatan lain. Penelitian PCIJ sebelumnya juga menunjukkan bahwa dinasti politik juga telah menyerbu distrik kongres, daftar partai, dan pemilihan gubernur. Bukan hanya jabatan Wali Kota adanya politik

dinasti tetapi juga jabatan Gubernur. Menurut data yang sama Philippine Center For Investigative Journalism's (PCIJ), setidaknya 71 dari 82 pemerintah Provinsi atau 87% dipimpin oleh anggota dinasti politik. Dari hasil Pusat Jurnalisme Investigasi Filipina dapat kita simpulkan bahwa tingginya presentasi dinasti politik di Filipina. Pertumbuhan dinasti politik Filipina terus bertambah dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab utama berkembangnya dinasti politik di Filipina adalah Klan Politik. Istilah Klan Politik ini merujuk pada keluarga (garis keluarga) yang memiliki anggota keluarga di berbagai posisi pemerintahan baik lokal maupun nasional dan mempertahankan kekuasaan/dominasi politik secara turun-temurun. Klan yang kuat telah lama memainkan peran utama dalam politiknya selama bertahun-tahun. Fenomena ini merupakan salah satu tantangan bagi negara Filipina yang di kenal sebagai negara demokrasi dinasti.

1.1.1 Klan Politik Filipina

Sebelum masa penjajahan, Filipina terbagi atas berbagai suku, budaya dan kelompok etnis yang memiliki sistem pemerintahannya sendiri. klan di pimpin oleh raja atau datu yang memiliki kekuasaan di wilayah tertentu. Klan ini berpengaruh dalam membentuk identitas budaya dan sosial masyarakat Filipina. Pada masa penjajahan Spanyol, Spanyol membawa perubahan dalam politik dan struktur sosial Filipina, salah satunya yaitu mengubah cara Klan beroperasi. Budaya klan berdampak ke ranah politik yang membentuk klan- klan politik. Klan lokal di angkat menjadi pemimpin daerah oleh pemerintah. Pada masa penjajahan Spanyol mewajibkan masyarakat Filipina mengadopsi nama Spanyol dan diikuti nama Klan di belakangnya. Pada masa Revolusi Filipina banyak klan yang terlibat dalam perang melawan penjajah. Pada saat Amerika berkuasa di Filipina, Amerika memperkenalkan sistem pemerintahan yang baru dan mengubah dinamika kekuasaan. Setelah perang dunia II, klan kembali berkuasa di Filipina. Pada masa sekarang, klan politik masih sangat berpengaruh di Filipina. Dinasti politik sering kali mendominasi pemilihan umum, dan banyak anggota keluarga yang menjabat di berbagai posisi pemerintahan. Meskipun ada upaya untuk reformasi dan pengurangan pengaruh klan, dan klan-klan tersebut terus menjadi bagian dari politik Filipina.

Klan politik di Filipina merujuk pada keluarga yang memiliki pengaruh politik yang kuat dan berkelanjutan di wilayah tertentu Filipina. Pada awalnya, Klan politik merupakan suatu wadah yang bertujuan untuk menampung aspirasi politik berdasarkan klan. Melalui klan politik ini, setiap anggota klan dapat menyampaikan hak-hak politiknya. Namun, perubahan dari masa ke masa membuat Klan politik Filipina terlibat dalam praktik dinasti politik, di mana anggota keluarga yang sama menduduki kekuasaan secara berulang kali di suatu wilayah, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Klan Politik di Filipina terus mengalami perkembangan, ini di tandai dengan adanya beberapa klan politik yang muncul di beberapa dekade terakhir. Selain jabatan Presiden dan Wakil Presiden, klan politik berkuasa di berbagai Kota di Filipina. Menurut data Philippine Center For Investigative Journalism's (PCIJ), atau Pusat Jurnalisme Investigasi Filipina pada Januari 2025, menunjukkan bahwa sedikitnya 75% atau tujuh dari setiap 10 Kota di perintah oleh klan politik. Data terbaru tahun 2025, ada beberapa klan politik yang kembali menguasai wilayah Filipina 2025. Kota Davao, kota terbesar di Filipina dalam hal luas wilayah, telah diperintah oleh keluarga mantan Presiden Rodrigo Duterte selama lebih dari dua dekade. Mantan presiden itu sendiri mencalonkan diri dalam pemilihan sela pada bulan Mei 2025 dengan harapan dapat kembali menduduki Balai Kota. Semua kota di Wilayah Ibu Kota Nasional diperintah oleh klan politik, penelitian PCIJ menunjukkan. Anggota klan Binay telah lama menguasai Kota Makati.

Pada bulan Mei, kita akan kembali melihat persaingan antarkeluarga dalam pemilihan wali kota kota tersebut. Senator Nancy Binay yang akan segera pensiun akan melawan Anggota DPR Kota Makati Luis Campos, suami dari saudara perempuannya, wali kota yang akan segera pensiun dan kandidat senator Abigail Binay. Suku Aguilar di Las Piñas, Abalosa di Mandaluyong, Tiangcos di Navotas, Cayetanos di Taguig, Gatchalian di Valenzuela, dan Belmontes di Kota Quezon juga telah lama menguasai kota mereka. Entah walikota petahana mencalonkan diri kembali atau anggota keluarga mereka berusaha menggantikan mereka.

Klan Politik di Filipina terus mengalami pertumbuhan, baik di tingkat lokal maupun nasional karena setiap pemilu adanya klan politik. Klan politik ini berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara saling mendukung mulai dari tingkat daerah hingga nasional, dimana pada tingkat daerah, peran sebuah klan dimainkan oleh para tokoh adat atau orang-orang yang memiliki kuasa untuk menggerakkan dan mendukung klan tersebut. Sementara di perkotaan, anggota klan yang memiliki ekonomi mapan memainkan peran penting, termasuk untuk mendanai klan yang ada di tingkat daerah.

1.2 Pengaruh Politik Dinasti Filipina

Pengaruh dinasti politik tidak semua berdampak negatif, karena beberapa keluarga dinasti politik telah menunjukkan kinerja yang baik dan komitmen terhadap pelayanan publik. Namun, pengaruh dinasti politik di Filipina lebih cenderung merugikan. Ketika dinasti politik berkuasa dan mendominasi kekuasaan dalam waktu lama, maka peluang individu lain untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara adil kecil. Selain itu, dinasti politik sering berkaitan dengan tindakan korupsi dan penyalahgunaan otoritas. Hal ini karena politik dinasti memberi ruang untuk praktik-praktik seperti, nepotisme, kolusi, dan pemanfaatan sumber daya publik untuk keuntungan kelompok atau individu. Dampak politik dinasti di atas hampir sama dengan apa yang telah di katakan oleh Mendoza dkk, yang menyebut bahwa politik dinasti memiliki dampak buruk pada tata kelola dan pembangunan. Lebih jauh, bukti empiris menunjukkan bahwa dinasti memiliki dampak buruk pada tata kelola, dan karenanya juga pada pembangunan. Dinasti politik dikaitkan dengan kemiskinan yang lebih besar, terutama di luar Luzon. Hal ini mengisyaratkan bahwa lembaga ekonomi, sosial, dan politik yang kurang berkembang di provinsi-provinsi yang jauh dari ibu kota memungkinkan dinasti untuk mempertahankan kekuasaan politik tanpa mendorong hasil pembangunan yang diinginkan.

Dinasti politik di Filipina sangat berdampak kepada masyarakat. Mereka yang berkuasa berada di sana untuk memperoleh keuntungan dari hubungan dan aliansi politik. Bencana ini terus berlanjut karena segelintir orang kaya tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di masyarakat. Masalah negara Filipina bersifat struktural. Penguasa politik mengendalikan kehidupan rakyat dan memanipulasi latihan politik untuk melanggengkan diri mereka ke dalam kekuasaan. Akibatnya, jutaan orang belum lepas dari perangkap kemiskinan dan terus menderita ketidaknyamanan birokrasi yang tidak kompeten. Masalah politik yang sebenarnya di Filipina adalah bahwa politik telah direduksi menjadi pengejaran kepentingan pribadi. Politik dinasti di Filipina sering kali di kaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Tidak selalu buruk bagi orang kaya untuk mencalonkan diri dan mencoba mengabdikan. Di sisi lain, jika Anda menjadi lebih kaya saat menjabat, itu adalah hal yang sama sekali berbeda. Maka, diperlukan pengawasan dan

keseimbangan yang berarti untuk menghindari kemungkinan konflik kepentingan dan mencegah penyalahgunaan posisi kekuasaan.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa politik dinasti sangat berpengaruh pada kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat dan telah berlangsung selama beberapa dekade yang menjadikannya salah satu tantangan utama dalam perkembangan demokrasi di Filipina. Politik dinasti bukan hanya memperkuat kekuasaan segelintir orang tapi juga menghambat partisipasi politik, memperkuat budaya korupsi, memperburuk ketimpangan, melemahkan demokrasi, dan menghambat kemajuan institusional.

1.2.1 Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Kualitas Demokrasi Filipina

Politik dinasti atau sistem kekuasaan yang di wariskan terjadi di negara demokrasi. Dalam prinsip demokrasi menjamin persamaan hak politik, di pilih maupun memilih, sehingga memungkinkan semua individu memiliki hak politik yang sama, baik anak pejabat maupun dari masyarakat umum. Persamaan hak politik berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam proses politik, tanpa diskriminasi berdasarkan keturunan, status sosial, atau latar belakang lainnya. Tanpa adanya regulasi dan aturan yang jelas terhadap persamaan hak politik, tentunya hal ini membuka celah bagi politik dinasti, meskipun pada dasarnya prinsip itu bertujuan untuk menciptakan keadilan politik dan membuka akses bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Politik dinasti bertentangan dengan prinsip demokrasi karena berfokus pada kepentingan pribadi. Demokrasi, pada dasarnya, menekankan legitimasi dan reproduksi kekuasaan melibatkan partisipasi banyak orang.

Sebagai salah satu negara demokrasi, Filipina menghadapi ancaman dominasi keluarga politik. Pengaruh politik dinasti di Filipina berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi. Dinasti politik merusak demokrasi dengan menciptakan keuntungan yang tidak adil. Mereka menggunakan kekayaan dan pengaruh mereka untuk tetap berkuasa, sehingga tidak ada peluang bagi persaingan yang nyata. Filipina mendapat peringkat Sebagian Bebas dalam *Freedom in the World 2022*, Sebagian Bebas dalam *Freedom on the Net 2021*, dan memiliki skor risiko 55 dari 100 dalam Indeks Kerentanan Pemilu milik Freedom House. Penurunan kualitas demokrasi di Filipina disebabkan oleh dinasti politik. Menurut Freedom House, kampanye pada tahun 2022 disinformasi yang terorganisasi yang menguntungkan Marcos dan berusaha mendiskreditkan lawan-lawannya. Dominasi dinasti politik merupakan hambatan bagi pelaksanaan hak politik bagi beberapa kelompok, dan kesempatan elektoral terbatas pada mereka yang mampu membayar biaya pencalonan untuk jabatan publik.

Secara Konstitusi di Filipina, tidak ada larangan yang membatasi partisipasi dalam proses politik, dan konstitusi menjamin akses yang sama terhadap kesempatan untuk pelayanan publik. Undang-undang yang melarang pembentukan dinasti politik di Filipina sudah ada yang bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan politik kepada beberapa orang. Konstitusi Filipina 1987, Pasal II, ayat 26, menyatakan: negara menjamin kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan publik, dan melarang dinasti politik sebagaimana di tetapkan dalam undang-undang. Meskipun konstitusi melarang dinasti politik namun, pada kenyataannya undang-undang ini belum mengatur secara spesifik larangan terhadap dinasti politik, sehingga implementasinya belum di jalankan secara efektif. Birokrat menjadi alat pemerintahan yang korup. Hal ini tampak jelas di provinsi dan kota yang didominasi oleh dinasti politik. Negara Filipina bahkan setelah Pemberontakan Kekuatan Rakyat tahun 1986 adalah bentuk demokrasi yang lumpuh yang

telah tunduk pada kepentingan pribadi politisi tradisional dan penguasa perusahaan. selain adanya undang-undang politik dinasti, upaya yang dilakukan konstitusi Filipina untuk membatasi politik dinasti adalah menetapkan masa jabatan untuk sejumlah jabatan publik. Namun, pembatasan masa jabatan publik, belum cukup untuk mencegah politik dinasti, karena keluarga politik dinasti bisa tetap mempertahankan kekuasaan dengan bergantian menjabat. Batasan masa jabatan tidak secara langsung memengaruhi sumber-sumber fundamental kekuasaan politik dinasti seperti kendali mereka atas tanah, akses ke sumber daya negara, lapangan kerja, dan kekerasan di provinsi masing-masing.

Melemahnya kualitas demokrasi di Filipina di tandai dengan hanya memberikan hak istimewa kepada sekelompok orang dan merampas hak-hak warga negara. Keberlangsungan politik dinasti di Filipina mengakibatkan melemahnya prinsip dasar demokrasi, yaitu kesetaraan politik. Dominasi politik dinasti menimbulkan dampak terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam hak memilih dan dipilih menjadi tidak sepenuhnya bermakna. Meskipun secara formal masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka, dalam praktiknya pilihan tersebut sering kali terbatas pada individu-individu yang berasal dari keluarga elite politik. Ini menghambat regenerasi kepemimpinan dan inovasi kebijakan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah-masalah publik secara efektif. Demokrasi pada prinsipnya menjamin partisipasi politik yang adil, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Namun kenyataannya demokrasi di Filipina berbeda, Demokrasi elite hanya memberi hak istimewa pada segelintir orang. Cara-cara mencari keuntungannya hanya menguntungkan mereka yang berada di atas. Meskipun Filipina menganut sistem demokrasi, dominasi politik dinasti membuat pemilu menjadi formalitas belaka di banyak daerah, karena kandidat independen sulit bersaing.

Hak warga negara juga sering diabaikan oleh penguasa politik Filipina. Keputusan politik sering kali di ambil bukan kebutuhan rakyat, tetapi demi memperkuat posisi politik keluarga yang berkuasa. Salah satu contoh adalah RUU politik dinasti Filipina. Dalam prosesnya pembahasan undang-undang anti politik dinasti sudah diajukan pada tahun 1987 namun, sampai saat ini belum mendapatkan pengesahan. Salah satu hambatan utama dalam pengesahan undang-undang ini adalah, dominasi anggota parlemen dari keluarga politik. Setelah pemilihan sela 2019, Rappler menghitung setidaknya 163 keluarga politik yang anggotanya termasuk seorang senator, perwakilan DPR, atau gubernur, yang menjabat pada saat yang sama dengan kerabat di posisi lokal lainnya. Keputusan-keputusan kelembagaan didasarkan pada pilihan-pilihan yang dibuat oleh orang-orang yang berwenang yang kepadanya para pemilih mempercayakan kekuasaan politik.

Menurut Robert Dahl demokrasi pada dasarnya menggunakan dua sistem yaitu. Kebebasan dalam kontestasi publik, dan partisipasi publik dalam politik. Ada beberapa ciri-ciri demokrasi menurut Dahl sebagai berikut: hak untuk memilih, kelayakan untuk jabatan publik, hak pemimpin politik untuk bersaing mendapatkan dukungan, pemilu yang bebas dan adil, Pada sistem yang pertama menurut Dahl, kebebasan dalam kontestasi publik. Politik dinasti mengakibatkan konsentrasi kekuasaan, karena kekuasaan politik hanya berpindah dalam keluarga tertentu. Ketika kekuasaan terpusat pada dinasti tertentu, dapat mengakibatkan calon dari luar dinasti mengalami kesulitan untuk bersaing. Sedangkan menurut Dahl pada ciri-ciri demokrasi yang ia kemukakan salah satunya adalah hak pemimpin politik untuk bersaing dan mendapatkan dukungan, politik dinasti tentunya bertentangan dengan hal ini. Sedangkan pada sistem kedua menurut Dahl, partisipasi publik dalam politik. Politik dinasti tentunya dapat

berdampak bagi partisipasi politik masyarakat karena masyarakat menganggap bahwa suara mereka hanya terbatas pada dinasti yang sama, maka mereka akan apatis dan tidak berpartisipasi dalam pemilihan. Ini menunjukkan meskipun sistem demokrasi secara umum tetap ada, kualitas substantifnya akan menurun jika kekuasaan berputar di lingkaran keluarga tertentu.

Salah satu dampak dari lain dari politik dinasti di Filipina adalah oligarki. Lebih jauh lagi, oligarki yang mengendalikan ekonomi formal terus mengambil keuntungan dari rakyat Filipina. Karena kurangnya pertumbuhan yang merata, kemiskinan tetap meluas di daerah pedesaan. Perekonomian terus-menerus didominasi oleh keluarga kaya dan berkuasa. Oleh karena itu, sisa-sisa masa lalu masih terus berlanjut dan menyebabkan hilangnya hak politik dan ekonomi rakyat Filipina. Munculnya Tim Gabungan Marcos-Duterte menyatukan dua keluarga terkemuka yang dikenal karena kecenderungan mereka yang memecah belah dan otoriter, dan menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masa depan demokrasi dan hak asasi manusia di negara tersebut. Baik Marcos maupun Duterte, dengan menggunakan nostalgia otoriter sebagai solusi untuk masalah politik, ekonomi, dan sosial yang berlaku (yaitu korupsi, inflasi, dan kemiskinan), sebenarnya telah memperkuat gaya berpolitik yang membuat masalah tersebut terus berlanjut. Di Filipina, perilaku oligarki meliputi: mengamankan kontrak pemerintah melalui koneksi pribadi, kegiatan ilegal seperti perdagangan orang dalam, dan menguasai lembaga regulasi untuk mendapatkan "kesepakatan yang menguntungkan". Politik dinasti di Filipina telah melahirkan oligarki, di mana kekuasaan politik dan kontrol ekonomi di kuasai oleh segelintir orang. Kepentingan publik sering di kalahkan oleh kepentingan pribadi dan bisnis keluarga penguasa. Pengaruh politik dinasti Filipina merupakan tantangan serius yang perlu diatasi untuk mencapai demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

1.2.2 Politik Dinasti Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Filipina Tahun 2016 dan 2022

Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Filipina tahun 2016, ada beberapa kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden yang pernah berkuasa di Filipina. Di antaranya adalah calon Presiden, Rodrigo Duterte, yang merupakan seorang penguasa lokal dari pulau Mindao, Kota Davao, dan Jejomar Binay, yang juga merupakan seorang penguasa lokal dari Kota Makati. Duterte dan Binay merupakan keturunan generasi pertama dari dinasti politik baru yang berbasis di perkotaan. Sementara disisilain, pada posisi calon Wakil Presiden munculnya dinasti politik Filipina, Ferdinand Marcos Jr (Bongbong) yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Menurut data Yayasan Internasional Untuk Sistem Pemilu/ International Foundation For Electoral System (IFES) pada tahun 2016, tingkat partisipasi pemilih di Filipina 78,1%, dengan jumlah pemilih terdaftar 55.735.757 orang.

Pada tahun 2016, politik dinasti pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak terlalu berpengaruh dalam kemenangan pemilu. Pada jabatan calon Presiden hal ini di buktikan dengan kalahnya dinasti politik yang berbasis nasional yaitu keluarga Roxas, di mana Mar Roxas yang merupakan cucu dari mantan Presiden Filipina Manuel Roxas, kalah dengan dinasti politik baru di tingkat nasional Filipina Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte sendiri yang merupakan Wali Kota Davao, dan telah berkuasa di Kota tersebut selama lebih dari 20 Tahun. Rodrigo juga merupakan wajah baru di kalangan dinasti politik di tingkat nasional Filipina. Sementara itu pada jabatan calon Wakil Presiden dinasti politik nasional yaitu keluarga Marcos, di mana Bongbong Marcos

kalah dengan Leni Robredo. Leni Robredo sendiri merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Filipina. Peristiwa di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dinasti politik tingkat nasional di Filipina tidak terlalu berpengaruh dalam kemenangan Presiden dan Wakil Presiden. Berikut nama-nama calon Presiden dan Wakil Presiden Filipina tahun 2016 dan latar belakangnya.

Dapat kita simpulkan bahwasanya ada beberapa calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang merupakan dinasti politik di Filipina baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal. Pada dinasti politik tingkat nasional, ada beberapa calon seperti, Bongbong Marcos yang merupakan anak Presiden Ferdinand Marcos dan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Senator, yang memiliki wilayah kekuasaan di Ilocos Norte sebagai calon Wakil Presiden, Mar Roxas yang merupakan cucu Presiden Manuel Roxas dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Senator yang memiliki wilayah kekuasaan di Provinsi Capiz, sebagai calon Presiden, Jejomar Binay yang merupakan Wakil Presiden 2010-2016 dan Wali Kota, yang memiliki wilayah kekuasaan di Makati, sebagai calon Presiden.

Pada dinasti politik tingkat lokal ada beberapa calon, seperti Rodrigo Duterte yang merupakan Wali Kota Davao, dan anak-anaknya terlibat dalam jabatan politik di Kota Davao, Sara Duterte (putrinya) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Paolo Duterte (putranya) Wakil Wali Kota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki wilayah kekuasaan di Kota Davao sebagai calon Presiden, Jejomar Binay, yang merupakan Wali Kota Makati, dan anak-anaknya terlibat dalam jabatan politik. Nancy Binay (putrinya) merupakan Senator, Abigail (putrinya) merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Wali Kota Makati, Jejomar Erwin Binay (putranya), merupakan Wali Kota Makati, yang memiliki wilayah kekuasaan di Kota Makati dan mencalonkan diri sebagai Calon Presiden. Alan Peter yang merupakan Wali Kota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Istinye terlibat dalam jabatan politik, Maria Laarni Lopez (istrinya) merupakan Wali Kota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang memiliki wilayah kekuasaan di Kota Taguig, sebagai calon Wakil Presiden. Leni Robredo yang merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, suaminya terlibat dalam jabatan politik, Jesse Robredo (suaminya) merupakan Wali Kota Naga, selama 19 tahun, dan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pada masa Presiden Aquino III, yang memiliki wilayah kekuasaan di Kota Naga, sebagai calon Wakil Presiden.

Pada pemilu 2022 politik dinasti sangat menonjol pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa kandidat dinasti politik, yaitu Bongbong Marcos, sebagai calon Presiden yang merupakan anak dari mantan Presiden Filipina, Sara Duterte sebagai calon Wakil Presiden yang merupakan anak dari mantan Presiden Filipina, dan Leni Robredo sebagai calon Presiden yang merupakan mantan Wakil Presiden. Menurut data Yayasan Internasional Untuk Sistem Pemilu/ International Foundation For Electoral System (IFES) pada tahun 2022, tingkat partisipasi pemilih mengalami peningkatan dari pemilu sebelumnya menjadi 83,11% dengan jumlah pemilih terdaftar 68.618.667 orang. Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Filipina 2022, politik dinasti sangat berpengaruh dalam kemenangan pemilu. Hal ini dibuktikan dengan menangnya aliansi dinasti politik nasional Filipina, yaitu keluarga Marcos dan Duterte. Aliansi politik ini menangkan pasangan Ferdinand Marcos Jr (Bongbong), sebagai Presiden dan Sara Duterte sebagai Wakil Presiden. Kedua dinasti ini merupakan dinasti politik di tingkat nasional di Filipina. Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2022 lebih banyak dari pada 2016, di mana pada tahun 2016 kandidat calon Presiden berjumlah enam orang, pada tahun 2022 calon Presiden berjumlah sepuluh orang. Pada posisi jabatan calon Wakil Presiden tahun 2016 jumlah

kandidat enam orang, sedangkan pada tahun 2022 jumlah kandidat calon Wakil Presiden sebanyak sembilan orang. Berdasarkan peningkatan jumlah kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden disebabkan berbagai faktor antara lain seperti, mencalonkan diri secara independen dengan memanfaatkan ketenaran, dominasi politik dinasti dan beberapa pejabat publik yang terkenal pada masa jabatannya.

Pada jabatan calon Presiden ada beberapa kandidat yang diunggulkan baik yang berasal dari dinasti politik maupun yang tidak. Di antaranya adalah Leni Robredo, Bongbong Marcos, Manny Pacquiao dan Isco Moreno. Leni Robredo yang merupakan Wakil Presiden sebelumnya tahun 2016-2022, kembali mencalonkan diri sebagai Presiden. Leni Robredo sendiri sudah terkenal di kalangan masyarakat karena jabatannya Wakil Presiden, ia memiliki wilayah kekuasaan di Kota Naga, dan Wilayah Bicol. Leni Robredo bersaing kembali dengan lawannya pada pemilihan Wakil Presiden tahun 2016 yaitu Bongbong Marcos. Bongbong Marcos merupakan sosok yang sudah terkenal di tengah-tengah masyarakat Filipina baik itu karena nama besar keluarga Marcos maupun karena jabatan publiknya sebagai Gubernur, Senator, Wakil Gubernur, dan Anggota Dewan yang memiliki wilayah kekuasaan di Ilocos Norte. Pesaing lainnya adalah Manny Pacquiao, yang merupakan figur terkenal di Filipina mantan atlet tinju kelas dunia dan pernah menjadi Anggota Dewan dan Senator. Manny Pacquiao memiliki wilayah kekuasaan di Kota General Santos di Wilayah Soccsksargen, Mindanao. Kandidat yang diunggulkan berikutnya adalah Isco Moreno yang merupakan seorang politikus terkenal yang pernah menjadi Anggota Dewan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Isco Moreno memiliki wilayah kekuasaan di Kota Manila. Kandidat lainnya adalah aktor politik di Filipina.

Pada jabatan calon Wakil Presiden yang paling mencuri perhatian publik adalah Sara Duterte yang merupakan putri dari Presiden Rodrigo Duterte. Selain sebagai putri Presiden, Sara Duterte juga pernah menjadi Wali Kota, Wakil Wali Kota, di wilayah kekuasaan keluarga mereka yaitu di Kota Davao. Pesaing Sara Duterte kebanyakan mantan Senator dan Anggota Dewan, seperti Kiko Pangilinan, Tito Sotto, Lito Atienza, dan Walden Bello. Sara Duterte dianggap sebagai calon yang paling unggul karena pengaruh dari ayahnya Rodrigo Duterte dan dianggap sebagai keberlanjutan politik dari pemerintahan ayahnya. Hal ini juga merupakan salah satu upaya keluarga Duterte untuk mempertahankan pengaruh politik di tingkat nasional di Filipina.

1.2.3 Pengaruh Politik Dinasti Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Filipina 2016 dan 2022

Politik dinasti memiliki pengaruh besar dalam kemenangan pemilu di Filipina. Kemenangan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Filipina 2016-dan 2022, tidak lepas dari pengaruh politik dinasti, melalui hubungan keluarga dan aliansi politik dinasti. Dinasti politik telah menjadi kekuatan yang dominan dalam pemilu. Ada beberapa hal yang menyebabkan politik dinasti menang dalam pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden Filipina 2016-2022 sebagai berikut:

1. Nama keluarga politik dan popularitas yang dikenal luas di kalangan masyarakat;
2. Dinasti politik mempunyai dana kampanye besar dan jaringan birokrasi lokal;
3. Berpengaruh dan memiliki kekuasaan politik beberapa wilayah;
4. Aliansi antar politik dinasti
5. Lemahnya undang-undang politik dinasti.

Pengaruh nama besar dan faktor-faktor di atas memberikan keunggulan dan sulit disaingi oleh kandidat yang bukan berasal dari dinasti politik. Penelitian Mendoza dalam tulisannya *Inequality, Oligarchy, and Dynasty*, melacak dinasti politik juga menunjukkan bahwa mereka memenangkan pemilihan dengan margin kemenangan yang jauh lebih besar, mungkin karena keuntungan yang jelas karena jabatan petahana dan, dalam beberapa kasus, banyaknya anggota keluarga yang sudah menjabat. Anggota dinasti politik memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk memenangkan pemilihan dibandingkan dengan kandidat non-dinasti. Politik dinasti memainkan peranan yang sangat penting dalam kontestasi pemilu di Filipina, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Kemenangan politik dinasti tidak lepas dari politik yang diwariskan dari generasi yang sebelumnya.

Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Filipina 2016, ada beberapa fenomena yang menarik, di antaranya adalah kemunculan kembali dinasti politik nasional Filipina yaitu keluarga Marcos dan Roxas. Namun dinasti ini tidak memenangkan pemilihan, sebaliknya keluarga politik dinasti lokal yang keluar sebagai pemenang pemilu yaitu Rodrigo Duterte dan Leni Robredo. Hal ini menunjukkan bahwa dinasti politik nasional pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Filipina 2016 tidak terlalu berpengaruh dalam kemenangan pemilu. Selain Fenomena di atas Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Filipina 2016 juga melahirkan politik dinasti tingkat nasional yang baru, yaitu keluarga Duterte dan Robredo. Di mana kedua politik dinasti baru ini mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Leni Robredo yang merupakan Wakil Presiden tahun 2016-2022, mencalonkan diri sebagai Presiden pada tahun 2022, dan Sara Duterte yang merupakan anak dari Rodrigo Duterte mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada tahun 2022, Sedangkan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Filipina 2022, politik dinasti sangat berpengaruh dalam kemenangan pemilu. Di mana aliansi politik dinasti nasional memenangkan pemilu, yaitu keluarga Marcos dan Duterte. Pemilu 2022, terdapat aliansi antar politik dinasti di tingkat nasional. Hal ini menarik perhatian publik karena aliansi keluarga ternama di Filipina yaitu keluarga Marcos dan Duterte. Pada bulan November 2021, koalisi "Uniteam" diformalkan, menyatukan dinasti yang paling menonjol dan terkenal dalam politik Filipina, yang memberikan dukungan mereka di belakang tiket Marcos-Duterte. Aliansi keluarga ini memenangkan pemilihan di mana Ferdinand "Bongbong" Marcos keluar sebagai pemenang Presiden sedangkan Sara Duterte keluar sebagai pemenang Wakil Presiden. Setelah kemenangan, aliansi ini tidak berjalan mulus, terjadinya konflik di antara kedua keluarga. Politik dinasti Filipina di tingkat nasional mengalami konflik pada tahun 2022, pasca pemilu. Retaknya aliansi di sebabkan oleh dua faktor yaitu, salah satunya adalah tidak adanya restu dari kepala keluarga Duterte, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kubu Marcos saat itu. Kedua adalah fakta bahwa Sara Duterte memperoleh lebih banyak suara daripada Bongbong Marcos, yang membuktikan besarnya pengaruh Duterte dan kekuatan mesin elektoral mereka.

Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Filipina 2016 dan 2022 ada beberapa kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan politik dinasti. Namun tidak semua menarik perhatian publik. Berikut beberapa kandidat yang menarik perhatian publik yaitu, pada tahun 2016 Rodrigo Duterte calon Presiden yang merupakan seorang politik dinasti lokal, Mar Roxas calon Presiden yang merupakan politik dinasti nasional, dan Bongbong Marcos calon Wakil Presiden yang merupakan dinasti politik nasional. Sedangkan pada tahun 2022, politik dinasti keluarga Marcos dan Duterte, Bongbong Marcos calon Presiden Sara Duterte calon Presiden dan terjadinya aliansi kedua keluarga ini. Leni Robredo calon Presiden yang merupakan Wakil

Presiden sebelumnya. Pengaruh politik dinasti di Filipina tidak hanya di tingkat nasional, namun berpengaruh juga di tingkat lokal. Awal mula dinasti politik berbasis di tingkat lokal yang kemudian menuju ke tingkat nasional.

Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Filipina 2016, calon Presiden Rodrigo Duterte keluar sebagai pemenang pemilihan Presiden. Duterte sendiri merupakan seorang dinasti politik lokal di Filipina, yang telah berkuasa selama dua dekade lebih di Kota Davao, Mindao. Sejak akhir jabatannya pada 2022, keluarga Duterte tetap aktif dalam politik nasional. Ia membangun politik dinasti nasional pada tahun 2022, ia menempatkan anaknya Sara Duterte sebagai calon Wakil Presiden. Keluarga Duterte dianggap sebagai bagian dari politik dinasti baru di tingkat nasional. Fenomena di atas menunjukkan bahwa pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Filipina tahun 2016 dan 2022, melahirkan politik dinasti yang baru di tingkat nasional. Selain melahirkan politik dinasti baru, pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Filipina 2016-2022, memunculkan kembali keluarga politik dinasti di tingkat nasional, yaitu keluarga Marcos.

KESIMPULAN

Politik dinasti di Filipina sudah ada pada masa penjajahan, di mana pada masa penjajahan hak pilih dan jabatan pemerintahan di batasi hanya untuk orang-orang tertentu. Jabatan pemerintahan yang bersifat turun-temurun ada pada masa penjajahan Spanyol dan Amerika. Dalam perkembangannya setelah Filipina merdeka, salah satu jabatan yang dianggap sebagai awal mula dinasti politik adalah Wali Kota. Pada masa penjajahan dinasti politik diawali dengan gelar bangsawan, namun pada masa sekarang, dalam memulai karier politiknya, Jabatan Wali Kota awal dari dinasti politik. Jabatan Wakil Wali Kota dan Wali Kota dianggap sebagai batu loncatan ke jabatan yang lebih tinggi seperti Wali kota, Gubernur dan bahkan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Pertumbuhan dinasti politik Filipina terus bertambah dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab utama berkembangnya dinasti politik di Filipina adalah Klan Politik. Istilah Klan Politik ini merujuk pada keluarga (garis keluarga) yang memiliki anggota keluarga di berbagai posisi pemerintahan baik lokal maupun nasional dan mempertahankan kekuasaan/dominasi politik secara turun-temurun.

Pada tahun 2016, politik dinasti pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak terlalu berpengaruh dalam kemenangan pemilu. Hal ini dibuktikan dengan kalahnya dinasti politik yang berbasis nasional, yaitu keluarga Roxas dan Marcos. Selain kalahnya dinasti politik nasional pada pemilihan ini juga ditandai dengan munculnya kembali dinasti politik lama di panggung politik nasional Filipina, yaitu keluarga Marcos, Bongbong Marcos sebagai calon Wakil Presiden. Sedangkan Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Filipina 2022, politik dinasti sangat berpengaruh dalam kemenangan pemilu. Hal ini dibuktikan dengan menangnya aliansi dinasti politik nasional Filipina, yaitu keluarga Marcos dan Duterte, walaupun pada akhirnya aliansi ini mengalami pertikaian, namun aliansi politik dinasti ini sangat berpengaruh dalam kemenangan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyasa K. R., (2015). *Pemilihan Presiden Secara Langsung Studi Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat*. (Skripsi Universitas Sriwijaya Indralaya)
- Anggreini R B., dkk. (2024). Perbandingan Pelaksanaan Pemilu Legislatif Antara Negara Indonesia dan Filipina. *Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol. 2, 94-106, No. (1)

- Ann G, Mendoza S. Dkk. (2024). Coattailing for Regime Continuity?: Unraveling Duterte's Legacy in Marcos Jr.'s 2022 Electoral Victory. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. Vol. 44. No. (1).
- Arguelles V. C. (2022). From Anarchy to Unity of Families in the 2022 Philippine Elections: A Marcos-Duterte Leviathan State? *Journal of Critical Perspective*. Vol.58, No. (2).
- Arrata, M. S., (2023). *Analisis Perbandingan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia dan Filiphina*. (Skripsi, Universitas Bakrie Jakarta).
- Bormann C, Golder M. (2013). Democratic Electoral Systems Around the World, 1946-2011. *Journal International Electoral Studies*. Vol, 32. 260-269.
- Dewanto, W. (2017). *Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila Melalui Pemilihan Umum Langsung Di Indonesia*. (Tesis Universitas Tama Jagakarsa).
- Dulay C. Dean. (2022). When Running for Office Runs in the Family: Horizontal Dynasties, Policy, and Development in the Philippines. *Comparative Political Studies*. Vol. 55, No. (4).
- Dulay, Dean C.;Hicken, Allen; Menon, Anil; Holmes, Rolan. (2023). Continuity, History, and Identity: Why Bongbong Marcos Won the 2022 Philippine Presidential Election. *Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 96, No. (1)
- Edward Aspinall dkk. (2016). Local Machines and Vote Brokerage in the Philippines. *Journal of International and Strategic Affairs*. Vol. 38, No. (2).
- Estacio A. A. (2023). Karanasan Ng Bangungot At Pantasya: Simulakrum Ng Batas Militar Sa Birtwal Na Espasyo. *Up Los Baños Journal*. Vol. 21, No. (3).
- Harewood G.W. (2016). Comparing The Advantages & Disadvantages Of First Past
- Homles D. R. (2016). The Dark Side of Electoralism: Opinion Polls and Voting in the 2016 Philippine Presidential Election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. Vol. 35, No. (3).
- Jessie S, M, Jr. (2025). Polarization in the 2022 Philippine Presidential Election Contending Frustrations with Post-EDSA I Democratization. *Paper University of the Philippines*.
- Kristal D. (2021). *Perbandingan (De) Konsolidasi Demokrasi Studi Penurunan Kualitas Demokrasi di Indonesia dengan Filipina Periode 2016-2020*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Kusuma, H. S, (2023). Indonesia Dan Filiphina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara. *Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi*, Vol. 1, No. (1), 19-31
- Maboloc R. C. (2017). Philippine Democracy and Political Reform. *In Active Democracy Leadership: Civil Society Empowerment in the Bangsamoro*.
- Maboloc R. C. (2019). The Predatory State and Radical Politic: the case of the Philippines. *Journal of ASEAN Studies*. Vol, 7. No, (2).
- Martinez B, Baladad R, Bello W. (2024). The Marcos-Duterte Dynastic Regime in the Philippines: How Long Will It Last? *Journal of Social Reseerch and Review*. Vol, 47. No (2).
- Mendoza Dkk. (2019). From Fat to Obese: Political Dynasties after the 2019 Midterm Elections. *Ateneo School Of Government Working Paper Series*.
- Mendoza U. Ronald. (2023). Inequality, Oligarchy, and Dynasty. *DLSU Business & Economics Review*. Vol. 32. No, (2).
- Natasha, S, D (2024). *Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Antara Negara Indonesia Dengan Negara Filiphina*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Oktaviany S. D. (2017). *Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina*. (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)
- Pasan E. (2013). Politik Dinasti Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Filipina Tahun 2001-2011. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 1, No. (3).

- Pratama, A. P, Fajar P, Priscylia F. (2023). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial (perbandingan Indonesia dan Filipina). *Jurnal Hukum*. Vol. 17, No. (2).
- Querubin Pablo. (2010). Political Reform and Elite Persistence: Term Limits and Political Dynasties in the Philippines.
- Rochayati N. (2010). Dinamika Demokrasi Lokal Di Asia Tenggara: Desentralisasi, Pilkada, dan Konflik Kekerasan di Indonesia dan Filipina. *Jurnal Politik Internasional*. Vol. 10, No. (2).
- Ronald U. Mendoza, Edsel L. Beja Jr. Victor S. Venida & David B. Yap (2012): Inequality in democracy: Insights from an empirical analysis of political dynasties in the 15th Philippine Congress, *Philippine Political Science Journal*, Vol,33. No. 2
- Ronald, Mendoza, Banaag, Dkk (2020). Term Limits and Political Dynasties the Philippines: Unpacking the Links. *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol 20. No. (4). Hlm 88-99
- Salazar S, Cook M. (2016). The Differences Duterte Relied Upon to Win. *Jurnal Ilmiah Terapan*. No. (34).
- Sholikin A. (2021). Kajian Model Demokrasi: Teori Dan Paradigma. *Jurnal Politik Dan Social Kemasyarakatan*. Vol. 13, No. (2).
- Smith M D. (2012). *Succeeding in Politics: Dynasties in Democracies* (Disertasi, University of California, San Diego
- Telaumbanua R. (2024). Dinasti Politik dan Kualitas Demokrasi di Pemerintahan Daerah Indonesia: "Evaluasi dan Perspektif". *Journal Of Government:Manajemen Pemerintahandan Otonomi Daerah*. Vol, 9. No, (2).
- The Post [Fptp], Alternative Voting [Av], And Proportional. Representation [Pr] Electoral Systems.
- Villaneuva B, Emmanuel. (2020). Political Dynasties and Human Development Investments: Evidence of Linkage from Rizal Province, Philippines. *Philippine Journal of Public Administration*, Vol. 64, No. (2).
- Zildjianda, R., Herlambang, D, Embri. (2024). Comparison Of the Presidential Government System Between Indonesia and The Philippines, *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. (8)